

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA, DAN HIPOTESIS

1.1 Kajian Pustaka

1.1.1 Akuntansi

1.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Soemarso (2010:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“... proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.”

Menurut T. Harrison Jr dkk. (2013:3) akuntansi adalah:

“... an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers.”

Menurut Sumarsan (2018:1) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan serta melaporkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Tumbuhnya bidang-bidang khusus di lapangan akuntansi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perekonomian karena kemampuan dari seseorang

terhadap cabang ilmu sangat terbatas. Berikut ini bidang-bidang akuntansi menurut

V. Wiratna Sujarweni (2017:6) adalah:

1. Akuntansi Keuangan
Akuntansi keuangan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan yang berguna untuk pihak dalam dan pihak luar perusahaan. Hasil dari akuntansi keuangan ini berupa laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Akuntansi Manajemen
Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Umumnya informasi yang dihasilkan sifatnya lebih dalam dan biasanya tidak dipublikasikan. Hasil dari akuntansi manajemen adalah berupa keputusan bidang keuangan.
3. Akuntansi Biaya
Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan, serta pengendalian biaya produksi. Objek yang utama dalam akuntansi biaya adalah produksi, jadi jelas akuntansi biaya dipergunakan untuk memproduksi bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Aktivitas menghitung biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan produksi kemudian membandingkannya dengan biaya yang berdasarkan taksiran. Akuntansi biaya hanya terjadi di perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang mentah menjadi barang jadi.
4. Akuntansi Pajak
Akuntansi pajak adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perhitungan pajak. Hasil dari akuntansi pajak adalah berupa hasil perhitungan pajak perusahaan yang disetorkan ke negara.
5. Pemeriksaan Akuntansi
Pemeriksaan akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana memeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Hasil dari pemeriksaan akuntansi adalah berupa laporan hasil pemeriksaan dari laporan keuangan suatu perusahaan.
6. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan sebuah rencana pengeluaran perusahaan dan kemudian membandingkan dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran mengurai aktivitas keuangan untuk sebuah jangka waktu tertentu yang juga dijalankan dengan sistem analisa dan pengawasan. Sebenarnya, akuntansi anggaran ini adalah bagian dari akuntansi manajemen.

7. Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah.
8. Akuntansi Pendidikan
Akuntansi pendidikan fokus kegiatannya diarahkan kepada bidang pendidikan, semisal terlihat kegiatan belajar mengajar bidang akuntansi, penyusunan kurikulum, penelitian tentang akuntansi, serta lainnya yang berhubungan dengan perkembangan ilmu akuntansi.
9. Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari prosedur-prosedur akuntansi yang ada dalam perusahaan, misalnya prosedur penjualan, pembelian, penggajian dan lainnya. Hasil dari sistem akuntansi adalah berupa informasi sistem-sistem yang berhubungan dengan akuntansi yang digunakan di perusahaan.
10. Akuntansi Internasional
Akuntansi internasional meliputi permasalahan yang timbul atas transaksi-transaksi perdagangan lintas negara (internasional) yang umumnya terjadi pada perusahaan-perusahaan multinasional.

Bidang akuntansi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Akuntansi Pajak.

1.1.1.3 Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun SPT, sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Menurut Waluyo (2011:35) akuntansi pajak adalah:

“... dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-

undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat lebih mudah dalam menyusun Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

1.1.2 Pajak

1.1.2.1 Definisi Pajak

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

1.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur):

1. *Fungsi Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti PPh, PPN, PPnBM, PBB dan sebagainya.
2. *Fungsi Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu PPnBM, pajak progresif, pajak ekspor dan sebagainya.

1.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10) sistem perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa yaitu:

1. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan WP. Wajib Pajak dianggap mampu

menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Membayar jumlah pajak yang terutang.
- d. Melaporkan jumlah pajak yang terutang.
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan, presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak yang ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

1.1.3 Laporan Keuangan

1.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan adalah:

“... menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Menurut Kasmir (2018:7) laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah:

“... merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Sedangkan pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:392) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk perhitungan perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal, yaitu:

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi
 - a. Prinsip konservatisme
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*)
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi
 - c. Metode penghapusan piutang
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final
 - c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan:
 - Kerugian suatu usaha diluar negeri
 - Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.
 - Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran
 - d. Pengeluaran tertentu diakui dalam komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangi penghasilan bruto

Ada pula menurut Siti Resmi (2019:395) perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perbedaan Tetap atau Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*), yakni transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tapi tidak diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya.

2. Perbedaan Sementara atau Perbedaan Waktu (*Timing Differences*), yakni perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya.

1.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Hery (2015:19) tujuan khusus laporan keuangan adalah:

“... menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan.”

Menurut Kasmir (2018:10) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
8. Informasi keuangan lainnya.

1.1.3.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:58-59), menyebutkan ada 5 (lima) jenis laporan keuangan diantaranya:

1. Neraca (*balance sheet*)
Merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi (*income statement*)
Merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal
Menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal.
4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan
Merupakan laporan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.
5. Laporan Arus kas
Merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk (pendapatan) dan arus kas keluar (biaya-biaya).

1.1.3.4 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:18) pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik
Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:
 - a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
 - b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode.
 - c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.
2. Manajemen
Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:
 - a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
 - b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
 - c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
 - d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang di inginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Bagi kreditor, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjamannya.
- b. Kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.
- c. Kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.

4. Pemerintah

Bagi pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.

1.1.4 Profitabilitas

1.1.4.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Kasmir (2018:195) profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

Sedangkan Hery (2015:192) mendefinisikan profitabilitas sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk

mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:64) profitabilitas merupakan:

“rasio untuk mengukur tingkat imbalan atas perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasi bisnisnya dalam periode waktu tertentu.

1.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik perusahaan atau manajemen saja, melainkan bagi pihak eksternal perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2018:197-198) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk pihak internal perusahaan:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

1.1.4.3 Pengukuran Profitabilitas

Menurut Hery (2015:228-235) jenis-jenis rasio profitabilitas antara lain sebagai berikut:

1. *Return on Assets* (ROA)

Return on assets merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Rumus untuk menghitung ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Return on Equity* (ROE)

Return on equity merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio

ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Semakin tinggi ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

Rumus untuk menghitung ROE sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin tinggi *gross profit margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tinggi harga jual dan/atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual dan/atau tingginya harga pokok penjualan.

Rumus untuk menghitung *gross profit margin* sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Operating profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi *operating profit margin* berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba kotor dan/atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya, semakin rendah *operating profit margin* berarti semakin rendah pula laba operasional

yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/atau tingginya beban operasional.

Rumus untuk menghitung *operating profit margin* sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Net profit margin digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Semakin tinggi *net profit margin* berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah *net profit margin* berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan.

Rumus untuk menghitung *net profit margin* sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran di atas, *return on assets* (ROA) menjadi indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini. Alasan memilih ROA karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aset untuk menghasilkan laba dan menjadi indikator yang mencerminkan kinerja perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja perusahaan. ROA juga berkaitan dengan laba suatu perusahaan. Ketika laba yang diperoleh semakin tinggi,

semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar, sehingga perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak.

1.1.5 Likuiditas

1.1.5.1 Definisi Likuiditas

Menurut Kasmir (2018:129) likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek.

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2010:25) mendefinisikan likuiditas adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah kemampuan pada suatu perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban finansialnya yang harus secepatnya dilunasi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan atau entitas bisnis dalam membayar kewajiban (utang) jangka pendek yang jatuh tempo untuk bisa memenuhi kewajiban finansialnya.

1.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Perhitungan rasio likuiditas dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan meliputi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan agar dapat menilai kemampuan perusahaan itu sendiri.

Sedangkan pihak eksternal perusahaan meliputi kreditor dan investor agar mengetahui seberapa likuid perusahaannya.

Menurut Kasmir (2018:132), berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

1.1.5.3 Pengukuran Likuiditas

Menurut Kasmir (2018:133-142) dalam praktiknya, untuk mengukur rasio keuangan secara lengkap, dapat menggunakan jenis-jenis rasio likuiditas yang ada. Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain,

seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan.

Rumus untuk mencari rasio lancar atau *current ratio* sebagai berikut:

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) atau rasio sangat lancar atau *acid test ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Artinya nilai sediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Untuk mengurangi *quick ratio* diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai sediaan. Terkadang perusahaan juga memasukkan biaya yang dibayar di muka jika memang ada dan dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.

Rumus untuk mencari rasio cepat atau *quick ratio* sebagai berikut:

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas (*cash ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara

dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat).

Rumus untuk mencari rasio kas atau *cash ratio* sebagai berikut:

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

atau

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Cash} + \text{Bank}}{\text{Current Liabilities}}$$

4. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turn Over*)

Rasio perputaran kas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.

Rumus untuk mencari rasio perputaran kas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

5. *Inventory to Networking Capital*

Inventory to networking capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antar jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan aktiva lancar dengan utang lancar.

Rumus untuk mencari *inventory to networking capital* sebagai berikut:

$$\text{Inventory to Networking Capital} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran di atas, *current ratio* atau rasio lancar sebagai indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini. Alasannya karena *current ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan melihat aset lancar perusahaan terhadap utang lancar (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan yang salah satunya adalah utang pajak). Semakin tinggi tingkat utang jangka pendek, semakin tinggi pula indikasi perusahaan melakukan agresivitas pajak karena menghindari beban pajak yang tinggi.

1.1.6 *Capital Intensity*

1.1.6.1 Definisi *Capital* (Modal)

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017) *capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, dan rasio-rasio keuntungan yang diperoleh.

Adapun pengertian menurut Munawir (2010):

“... modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya.”

Menurut Lukas Setia Atmaja (2008:155) modal adalah dana yang digunakan untuk membaca pengadaan aktiva dan operasi perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *capital* (modal) adalah dana yang digunakan perusahaan dalam aktivitas pendanaan atau operasi perusahaan.

1.1.6.2 Jenis-jenis *Capital* (Modal)

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan perusahaan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman.

Jenis-jenis modal menurut Bambang Riyanto (2010:227&240) adalah:

1. Modal Asing/Utang

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing terbagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Modal Asing/Utang Jangka Pendek (*Short-term Debt*)
- b. Modal Asing/Utang Jangka Menengah (*Intermediate-term Debt*)
- c. Modal Asing/Utang Jangka Panjang (*Long-term Debt*)

2. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

1.1.6.3 Definisi *Capital Intensity*

Capital Intensity didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap (Noor dkk., 2010:190).

Menurut Hendro Tobing (2018:3):

“*Capital intensity* mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.”

Adapun menurut Winarno (2015:12) intensitas modal merupakan rasio antara penjualan dengan total aset. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi

penggunaan aset oleh perusahaan. Rasio ini merupakan hambatan masuk bagi perusahaan baru. Perusahaan baru yang akan memasuki pasar oligopoli harus memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, kalau tidak perusahaan tersebut tidak akan mampu memasuki pasar yang baru. Perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi tentunya akan lebih mudah memperoleh laba. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan aktiva tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* adalah seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap untuk menghasilkan laba.

1.1.6.4 Pengukuran *Capital Intensity*

Menurut Noor dkk. (2010:193) intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan yang dibandingkan dengan total aset perusahaan. *Capital intensity* menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset. *Capital intensity* dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

1.1.7 Agresivitas Pajak

1.1.7.1 Definisi Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak menurut Frank dkk. (2009:468) dalam Kariimah & Septiowati (2019:18) adalah:

“...suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara secara legal (*tax avoidance*) atau secara ilegal (*tax evasion*). Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* terdapat pada sisi legalitasnya.”

Menurut Lanis & Richardson (2012:86) menjabarkan agresivitas pajak sebagai berikut:

“... we define tax aggressiveness as the downward management of taxable income through tax planning activities. It thus encompasses tax planning activities that are legal or that may fall into the gray area, as well as activities that are illegal. Thus, the term tax aggressiveness is broadly defined.”

Dari pengertian menurut Lanis & Richardson (2012:86) agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai: “... pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (*gray area*) maupun kegiatan yang ilegal.”

Menurut Jessica & Toly (2014) agresivitas pajak merupakan:

“... bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. Apabila dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan.”

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak yang dapat dilakukan melalui cara yang legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*), akan tetapi lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya dengan cara menekan beban pajak yang dibayarkan seminimal mungkin.

1.1.7.2 Pengukuran Agresivitas Pajak

Menurut Sari & Martani (2010) agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi yaitu:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

3. *Book Tax Difference Manzon Plesko* (BTD_MP)

$$BTD_MP = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

4. *Book Tax Difference Desai-Dharmapala* (BTD_DD)

$$\text{Total Akrua} = \text{Net Income} - \text{Cash Flow Operation}$$

$$BTD_{DD} = \frac{\text{Total Akrua} + \text{Average Value of Residual}}{\text{Total Aset}}$$

5. *Tax Plan*

$$TAXPLAN = \frac{\sum_t^{t-2} [\text{PTI} \times 30\% + \text{Current Portion of Total Tax Expense}] : 3}{\text{Ending Assets}}$$

Menurut Lanis dan Richardson (2012:91), mendefinisikan ETR sebagai berikut:

“*Effective Tax Rate* adalah efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yang digunakan untuk merefleksikan perbedaan-

perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Tarif pajak ETR dihitung dengan cara membagi total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012:91), agresivitas pajak dapat diukur dengan:

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Pendapatan\ Sebelum\ Pajak}$$

Menurut Rist & Pizzica (2014:54) menyatakan bahwa:

“... ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.”

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menghitung agresivitas pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa ETR adalah proksi yang paling umum digunakan oleh peneliti atau ahli. Pengukuran proksi ETR dipandang sebagai indikator adanya aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila memiliki nilai ETR yang mendekati nol.

Berdasarkan undang-undang sebelumnya, yakni Pasal 17 Ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ditetapkan tarif PPh Badan sebesar 25% sejak Tahun Pajak 2010–2019. Setelah itu terdapat Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 dimana

tarif PPh Badan turun secara bertahap dari 25% menjadi 22% (untuk tahun pajak 2020 & 2021) dan 20% (untuk tahun pajak 2022).

Ketentuan tarif pajak badan kembali direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui UU HPP, tarif PPh Badan berubah menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022. Dengan kata lain, pengenaan PPh Badan 22% yang sudah diberlakukan sejak 2020 dan 2021 diperpanjang lagi mulai 2022.

1.1.8 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang topiknya berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	(Putri & Hanif, 2020)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak.	Likuiditas, <i>leverage</i> , dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2.	(Mulasari & Hidayat, 2020)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.	Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan <i>leverage</i> dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3.	(Ayem & Setyadi, 2019)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan	Profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, dan <i>capital</i>

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
		<i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak.	<i>intensity</i> berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak.
4.	(Yuliana & Wahyudi, 2018)	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak.	Profitabilitas & <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan likuiditas, ukuran perusahaan, <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5.	(A. T. Hidayat & Fitria, 2018)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak.	<i>Capital intensity</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan <i>inventory intensity</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6.	(Fahrani dkk., 2017)	Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak.	Kepemilikan terkonsentrasi, <i>leverage</i> , dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
7.	(Adiyani & Septanta, 2017)	Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan CSR sebagai Variabel Intervening.	Likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh secara

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
			signifikan terhadap agresivitas pajak.
8.	(Rahayu & Aeni, 2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Market to Book Ratio</i> , Kepemilikan Mayoritas, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak.	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan <i>market to book ratio</i> berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan profitabilitas dan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
9.	(Dwilopa, 2016)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Perencanaan Pajak terhadap Agresivitas Pajak.	CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan <i>capital intensity</i> dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
10.	(Tiaras & Wijaya, 2015)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.	Likuiditas, <i>leverage</i> , dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

1.2 Kerangka Pemikiran

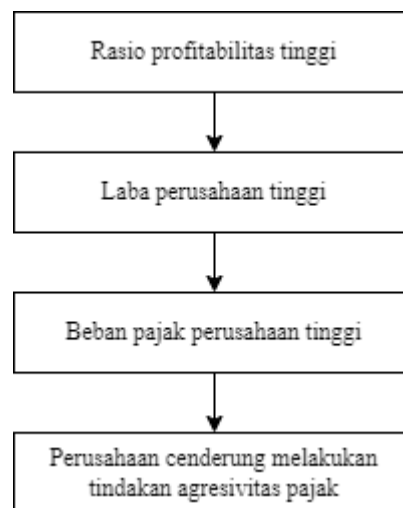
1.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasi bisnisnya dalam periode waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis pengukuran *Return on Assets* (ROA) karena ROA merupakan instrumen yang dimanfaatkan dalam melakukan penilaian persentase keuntungan dari akumulasi jumlah aset yang perusahaan miliki. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi pasti berusaha demi melaksanakan tindakan strategis untuk meminimalisir beban pajak, sehingga beban pajak menjadi rendah (Munawar dkk., 2022).

Menurut Rodriguez & Arias (2012) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Adiyani & Septanta, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita Adiyani & Rananda Septanta (2017) dan Sri Ayem & Afik Setyadi (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu & Ida Nur Aeni (2017), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), dan Agus Taufik Hidayat & Eta Febrina Fitria (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas
terhadap Agresivitas Pajak

1.2.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Likuiditas yang tinggi akan menjelaskan bahwa perusahaan tersebut mampu dalam memenuhi kewajibannya artinya *resources* perusahaan tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan aktiva

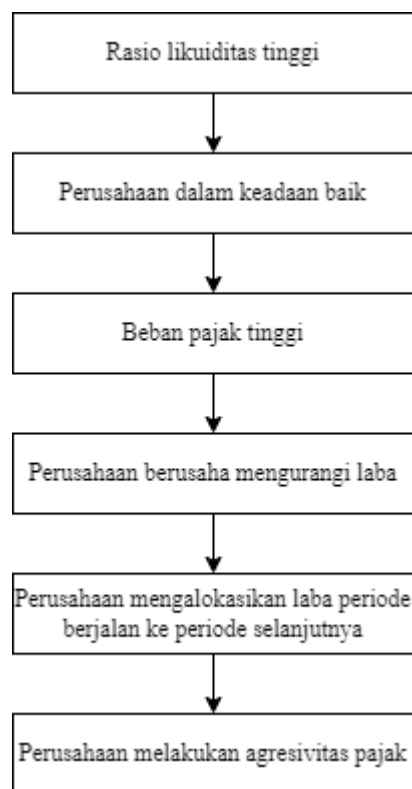
lancar sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi kemungkinan adanya tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut disebabkan karena rasio likuiditas yang tinggi menggambarkan perusahaan tersebut dalam keadaan baik dan investasi yang akan didapat juga akan besar seiring dengan laba yang didapatkan, sehingga beban pajak akan naik dan akan membuat perusahaan kemungkinan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi pembayaran pajak yang akan menurunkan tingkat likuiditas yang dimiliki (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan, maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan semakin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan berbanding positif dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan (JayantoPurba & Kuncahyo, 2020).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dengan tingkat likuiditas yang tinggi, perusahaan akan lancar dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya, akan tetapi perusahaan lebih menginginkan pembayaran pajaknya sedikit sehingga melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018) dan Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif (2020) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang

dilakukan oleh Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), Novita Adiyani & Rananda Septanta (2017), dan Riri Muliastari & Angga Hidayat (2020) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran Pengaruh Likuiditas
terhadap Agresivitas Pajak

1.2.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

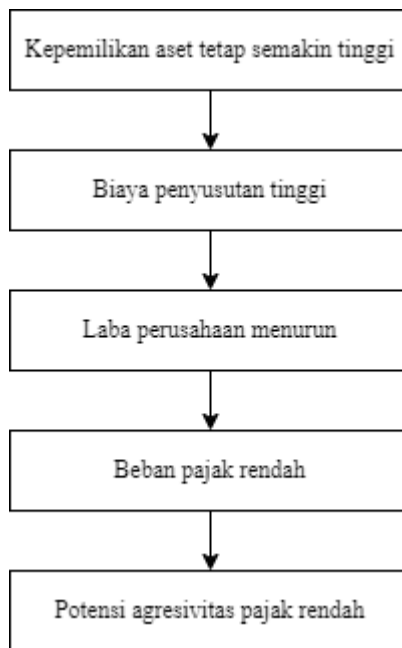
Capital intensity ratio adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital*

intensity juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan (Indradi, 2018).

Menurut Rodriguez & Arias (2012) aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah.

Liu & Cao (2007) menyebutkan bahwa biaya penyusutan yang tinggi mengakibatkan laba perusahaan menurun dan beban pajaknya rendah. Dengan demikian semakin besar proporsi aset tetap dan biaya penyusutan, perusahaan akan mempunyai beban pajak yang rendah sehingga cenderung tidak melakukan agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dio Erlangga Dwilopa (2016), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Agus Taufik Hidayat & Eta Febrina Fitria (2018), dan Sri Ayem & Afik Setyadi (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hanik Lailatul Kuriah & Nur Fadjrih Asyik (2016), Meita Fahrani, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Capital Intensity*
terhadap Agresivitas Pajak

1.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H_2 = Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H_3 = *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.